



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PASURUAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada umumnya dan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan pada khususnya, dalam kenyataannya semakin meningkat, sehingga tidak dapat lagi menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, terutama di bidang pembangunan;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dan Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dan Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan diubah dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan yaitu :
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Pohjentrek yang meliputi :
 1. Desa Pohjentrek;
 2. Desa Gentong;
 3. Desa Sabani;
 4. Desa Wirogunan
 5. Desa Bukir;
 6. Desa Petaunan;
 7. Desa Randusari;
 8. Desa Krapyakrejo;
 - b. Sebagian wilayah Kecamatan Gondang Wetan yang meliputi :
 1. Desa Tambakrejo;
 2. Desa Sangkargadung;
 - c. Sebagian wilayah Kecamatan Kraton yaitu : Desa Karangketug.
 - d. Sebagian wilayah Kecamatan Rejoso yang meliputi :
 1. Desa Kepel;
 2. Desa Tapaan;
 3. Desa Bakalan;
 4. Desa Blandongan;

sehingga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sehingga batas wilayah Kotamadya, Daerah Tingkat II Pasuruan menjadi sebagaimana terdapat pada peta terlampir.

- (2) Wilayah Kecamatan Pohjentrek, wilayah Kecamatan Gondang Wetan, wilayah Kecamatan Kraton dari wilayah Kecamatan Rejoso dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dibagi dalam 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Gadingrejo, yang terdiri dari :

1. Desa Karangketug;
2. Kelurahan Gadingrejo;
3. Kelurahan Tamban;
4. Kelurahan Trajang;
5. Desa Gentong;
6. Kelurahan Karanganyar;
7. Desa Sabani;
8. Desa Petaunan;
9. Desa Bukir;
10. Desa Randusari;
11. Desa Krapyakrejo;

- b. Kecamatan Purworejo, yang terdiri dari :

1. Kelurahan Ngemplakrejo;
2. Kelurahan Mayangan;
3. Kelurahan Bangilan;
4. Kelurahan Kebonsari;
5. Kelurahan Purworejo;
6. Kelurahan Kebonagung;
7. Desa Pohjentrek;
8. Desa Wirogunan;
9. Kelurahan Purutrejo;
10. Desa Tambakrejo;

- c. Kecamatan Bugul Kidul, yang terdiri dari :

1. Desa Blandongan;
2. Desa Kepel;
3. Desa Tapaan;
4. Kelurahan Panggungrejo;
5. Kelurahan Mandaranrejo;
6. Kelurahan Bugul Lor;

7. Kelurahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Kelurahan Kandanghari;
8. Kelurahan Bugul Kidul;
9. Kelurahan Pakuncen;
10. Kelurahan Petamanan;
11. Kelurahan Krampayangan;
12. Desa Sekargadung;
13. Desa Bakalan;

Pasal 4

- (1) Pusat pemerintahan Kecamatan Gadingrejo berkedudukan di Gadingrejo.
- (2) Pusat pemerintahan Kecamatan Purworejo berkedudukan di Purworejo.
- (3) Pusat pemerintahan Kecamatan Bugul Kidul berkedudukan di Bugul Kidul.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan yang berlaku bagi desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi desa-desa dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, peralatan, kependudukan, penghasilan daerah, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua Peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 73



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
PASURUAN

UMUM

1. Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 telah dibentuk Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur antara lain Kabupaten Pasuruan yang pada waktu ini disebut Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 telah dibentuk Kota-kota kecil di Jawa antara lain Kota Kecil Pasuruan yang pada waktu ini disebut Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Dalam kenyataannya pada waktu sekarang ini perkembangan kegiatan sosial ekonomi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada umumnya dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan pada khususnya meningkat dengan pesat, terutama dalam bidang pembangunan.
3. Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan terbentur pada masalah-masalah tersedianya areal tanah untuk pembangunan, mengingat wilayahnya yang relatif cukup padat, sehingga tidak ada lagi persediaan tanah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan bagi terciptanya penataan lingkungan kehidupan perkotaan yang layak.
4. Berhubung dengan itu maka sudah saatnya bila wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan tersebut diperluas, sehingga dengan demikian terciptalah keadaan yang memungkinkan untuk mengadakan fasilitas dan utilitas perkotaan yang layak, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Kotamadya Daerah tingkat II Pasuruan.
5. Untuk maksud perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan tersebut ditempuh dengan memasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan sebagian dari wilayah yang dipindahkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan yang meliputi 1 (satu) desa dari Kecamatan Kraton, 8 (delapan) desa dari Kecamatan Pohjentrek, 2 (dua) desa dari Kecamatan Gondang Wetan, dan 4(empat) desa dari Kecamatan Rejoso.
Pemisahan desa-desa tersebut dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan telah disetujui oleh kedua Pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam :
 - a. Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor DPRD 022/119/1979 tanggal 24 Maret 1979 dan Nomor DPRD 022.2/11/1979 tanggal 14 Juni 1979.

b. Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Surat Keputusan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor DPRD.041/30/1979 tanggal 9 Juni 1979 dan Nomor DPRD 041/32/1979 tanggal 15 Juni 1979.
6. Dengan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan tersebut, maka Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan masih tetap berlaku bagi wilayah desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, sampai peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tersebut diubah atau dicabut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
7. Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, maka penyelenggaraannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3241